



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

10 **PEMOHON 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

15 Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

15 Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

20 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.PLG.

25 1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Seberang Ulu Satu di rumah orang tua Pemohon II di KOTA PALEMBANG;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus jejaka dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II bersetatus perawan dalam usia 19 tahun;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan nomor 336/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut wali nikahnya wali nasab adalah orang tua kandung Pemohon II bernama **xxxx** **xxxx**;
4. Bahwa, pernikahan para Pemohon, disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama **xxxx** dari pihak Pemohon I dan **xxxx** selaku saksi dari pihak Pemohon II, masing-masing beragama Islam, Mas kawinnya berupa 2 Suku Emas dibayar tunai, Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan Pemohon I, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh orang tua Pemohon II dan Qobulnya oleh Pemohon I;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di KOTA PALEMBANG sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri telah diberi 1 orang keturunan anak bernama; **Anak Pemohon I dan II** lahir di Palembang, tanggal 01 April 2019 jenis kelamin Perempuan umur 4 tahun 5 bulan, pendidikan -;
Anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon .
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Satu, Karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat;
10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palembang, guna

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan nomor 336/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Satu xxxxxxxxx dan untuk mengurus **Akta Kelahiran Anak, dan membuat Kartu Keluarga** dan administrasi lainnya serta untuk mengurus surat menyurat untuk tercapainya kepastian hukum;

11. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Palembang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal, 12 April 2018 di Kecamatan Seberang Ulu Satu xxxxxxxxx ;
3. Memerintahkan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau mohon putusan/penetapan lain yang seadil- adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri dalam sidang.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxx atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan NIK: xxxx atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan nomor 336/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 11-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Seberang Ulu I Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Asli Surat Keterangan Nikah belum Tercatat Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I tanggal 24 Oktober 2023, tanpa Legalisir Pos, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Asli Surat Tentang Keterangan Nikah Pertama yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lima Ulu dengan Nomor: xxxx, Tanpa Legalisir Pos, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **SAKSI 1**, 63, Islam,SD,xxxxx Harian Lepas, KOTA PALEMBANG, SEBAGAI MAMANG

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon I.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 April 2018, di Kecamatan Seberang Ulu I, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx xxxx dengan maskawin berupa

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan nomor 336/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua suku emas dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama xxxx dan Usman;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- 5 – Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

10 2. Saksi Kedua : **SAKSI 2**, 31, Islam, SLTA, xxxxx Harien Lepas, KOTA PALEMBANG, SEBAGAI KAKAK

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Kakak Pemohon I.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang
- 15 menikah secara Islam pada tanggal 12 April 2018, di Kecamatan Seberang Ulu I, xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik
- 20 karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxx dengan maskawin berupa dua suku emas dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama xxxx dan
- 25 Usman;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- 30 – Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan nomor 336/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulan dan akhirnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal
5 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan Itsbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

15 Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palembang selama 14 (empat belas) hari, namun selama dalam tenggang waktu tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak
20 yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palembang karena merasa dirugikan dengan adanya permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami
25 dan isteri, suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

30 Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *volunter* yang menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan nomor 336/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi di pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg "siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya atau perbuatannya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu", oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4) serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah KTP Pemohon I dan Pemohon II, yang menunjukkan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di xxxx xxxxxxxxx sebagai bagian dari wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, sehingga Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah Kartu Keluarga Pemohon I, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi: *"pengertian Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga"*. Bukti ini telah menjadi fakta bahwa secara administrasi kependudukan, Pemerintah xxxx xxxxxxxxx belum mengakui adanya hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, sehingga

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan nomor 336/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini dapat diterima menjadi bukti permulaan untuk dikuatkan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Kecamatan Seberang Ulu I menjadi bukti permulaan bagi
5 Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang benar tidak terdaftar di KUA Kecamatan Kecamatan Seberang Ulu I, sehingga dapat diterima sebagai bukti permulaan untuk dikuatkan lagi dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa Surat Keterangan Nomor xxxx
10 dari Kelurahan Lima Ulu xxxx xxxxxxxxx menjadi bukti permulaan bagi Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang benar perkawinan pertama, sehingga dapat diterima sebagai bukti permulaan untuk dikuatkan lagi dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, mereka
15 tidak termasuk kedalam orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya
20 saling bersesuaian, yang menerangkan antara lain bahwa: "*Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 12 April 2018 di Kecamatan Kecamatan Seberang Ulu I xxxx xxxxxxxxx, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama xxxx xxxx, dengan mahar berupa dua suku emas dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah*
25 *yaitu xxxx dan xxxx*", dengan demikian keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
30 ketentuan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah An-Nisa' ayat 22, 23 dan 24, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan nomor 336/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang rukun perkawinan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan
5 kabul. Kemudian Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang empat kelompok wali nasab secara berurutan sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kemudian pada Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya
10 disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum
15 Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah bergaul dan
20 hidup bermasyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan dengan status hubungan perkawinan mereka, fakta mana lazimnya tidak mungkin Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai Satu orang anak, karenanya patut
25 diyakini Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah menurut tata cara syariat Islam yang diketahui dan diterima oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat (P.) serta saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 30 1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
2. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 12 April 2018 di Kecamatan Kecamatan Seberang Ulu I

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan nomor 336/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxx xxxxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama
xxxx xxxx dengan mahar berupa dua suku emas dibayar tunai dan
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu xxxx dan xxxx;

3. Bahwa, sejak akad nikah hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada
5 buku nikah sebagai bukti pernikahannya;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab,
tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
5. Bahwa, sejak akad nikah hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II
10 tidak pernah bercerai dan tidak ada suami atau isteri lain selain mereka
berdua dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri telah bergaul di
tengah masyarakat dalam waktu yang cukup lama dan selama itu pula tidak
ada orang yang merasa keberatan atau mempermasalahkan keabsahan
perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

15 Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang
selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab
Al-xxxx Juz II halaman 461 yang berbunyi :

20 ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak
memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata
laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.

Dan dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

25 وفي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ غَدُولٍ

30 Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat
menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan
dua orang saksi yang adil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim juga berkesimpulan alasan pengajuan ltsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan tata cara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sehingga dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penetapan Nikah ini menggunakan asas *Retro aktif* atau asas berlaku surut karena meskipun Penetapan Nikah / lsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II baru dilakukan sekarang, namun kekuatan hukum perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang berbunyi: "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", dan Pasal 36 yang berbunyi: "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*"; maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan dan atau Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register Akta Perkawinan dan untuk penerbitan Akta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan nomor 336/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

5

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal, 12 April 2018 di Kecamatan Seberang Ulu Satu xxxx xxxxxxxx ;
3. Memerintahkan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang;
- 15 4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023
20 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syazili, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
25 dibantu Andi Fajaryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan nomor 336/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Fajaryani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp 350.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palembang
Panitera,

Yuli Suryadi, S.H., M.M.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan nomor 336/Pdt.P/2023/PA.PLG